

UNIVERSITAS, NEGARA, DAN MASYARAKAT INDONESIA: IMPLEMENTASI PARADIGMA MODERNISASI DI ERA ORDE BARU

*Hanneman Samuel**

ABSTRACT

More than just a slogan, modernization is a complex of political knowledge. Scientific studies intertwine with development strategy in such a way that modernization theories became means of communications as well as means of orientations. This is exemplified during the New Order era: Indonesian academic intellectuals justify their support for the New Order government on scientific bases. Based on the use of library research, there are four fields upon which intersections between the interests of the New Order government and the interests of academic intellectuals have rested. The first is the systemic integration of Indonesian society. The second is New Order era as the beginning of development. The third concerns with technocratisation of development. The fourth concerns with the dilemma of poverty.

Key Words: paradigm of modernization, *state patronage*, intellectual, political knowledge

ABSTRAK

Modernisasi bukan hanya sekedar slogan, tetapi politik pengetahuan yang kompleks. Kajian ilmiah kait-mengait dengan strategi pembangunan sedemikian rupa sehingga kerangka pikir modernisasi menjadi alat komunikasi sekaligus orientasi. Hal ini dapat dicontohkan pada Zaman Orde Baru: kaum intelektual memberikan pembenaran dukungan mereka bagi Orde Baru dengan dasar-dasar keilmuan. Berdasarkan kajian pustaka, dapat ditunjukkan empat bidang yang menjadi kepentingan bersama antara Orde Baru dengan kaum intelektual, yaitu integrasi sosial, Orde Baru sebagai awal pembangunan, teknokratisasi pembangunan, dan masalah kemiskinan. Tulisan ini mencoba membahas keempat bidang tersebut.

Kata Kunci: paradigma modernisasi, *state patronage*, intelektual, politik pengetahuan

PENGANTAR

Dalam karyanya, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*, Ariel Heryanto (2006) mengatakan bahwa pemerintah Orde Baru membangun dan mempertahankan *regime* melalui terorisme negara dan politisasi identi-

tas. Namun, persoalan akan menjadi berbeda bila dinamika universitas – dengan intelektual akademik sebagai ujung tombaknya – ikut diperhatikan. Bila temuan Heryanto digunakan mentah-mentah, kemungkinan besar akan sampai pada kesimpulan bahwa universitas

* Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta

merupakan bagian dari mekanisme Orde Baru. Tentunya, seperti yang akan dikemukakan dalam tulisan ini, kesimpulan seperti ini menyatakannya. Dengan kata lain, argumen bahwa produksi pengetahuan ilmiah semata-mata merupakan respons universitas atas dasar ketidakberdayaan menghadapi negara tidak dapat begitu saja diterima. Edward Said (1994: 20) mengatakan "*the intellectual's representations, his or her articulations of a cause or idea to society, are not meant primarily to fortify ego or celebrate status. Not are they principally intended for service within powerful bureaucracies and with generous employers.*"

Penelitian ini merupakan paradigma modernisasi yang dikembangkan selama perang dingin yang merupakan *grand design* yang melandasi corak hubungan negara dan universitas pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru merupakan implementor – bukan *executor* – paradigma modernisasi. Begitu juga dengan *Indonesian universities* pada masa itu.

INTEGRASI SISTEMIK MASYARAKAT INDONESIA

Kesan umum yang berkembang di kalangan pengembang dan pengguna paradigma modernisasi adalah kepluralistisan masyarakat Indonesia selayaknya dipandang sebagai kondisi awal untuk memahami dinamika Indonesia pada masa Orde Baru. Lebih jauh, melalui pengajaran ilmu-ilmu sosial, kemurnian ciri Indonesia tersebut mengalami proses transmisi kultural ke berbagai kalangan yang lebih luas. Gagasan Indonesia sebagai masyarakat pluralistik pun, dengan demikian sekaligus menjadi *means of communications and means of orientations* yang ampuh. Kerusakan dan berbagai peristiwa yang lazim disebut "konflik horizontal", "konflik SARA", atau "konflik komunal" mereka jadikan bukti tentang kebenaran ciri kepluralistisan Indonesia.

Persoalan lain, intelektual akademik menjadi disibukkan dengan berbagai masalah sosial di seputar integrasi sosial. Mereka, mungkin tanpa sadar, cenderung melihat kepluralistisan sebagai sumber masalah sosial dan dijadikan *silent partner* dalam memproduksi pengetahuan ilmiah.

Persoalan tidak berhenti di situ saja. Intelektual akademik – dalam kolaborasi mental dengan pengembang paradigma modernisasi – tanpa disadari telah mereproduksi kecenderungan untuk membagi masyarakat Indonesia ke dalam satuan-satuan budaya. Ada satuan budaya asli, ada yang kurang (atau sama sekali tidak) asli. Tiap satuan budaya pun dipandang memiliki batas-batas yang jelas. Satuan budaya Jawa, misalnya, dikesankan memiliki batas-batasnya sendiri sehingga perbedaannya dengan satuan budaya Sunda dan berbagai satuan budaya lain dapat terlihat. Toleransi dipandang sebagai toleransi antarsatuan budaya – golongan etnik, ras, bahasa, agama, adat, dan satuan budaya sejenis. Dengan demikian, paradigma modernisasi – yang menekankan keunikan setiap satuan budaya dan perbedaannya dengan satuan budaya lain – tanpa disengaja telah ikut menjadi landasan mental-teoretis untuk terlibat dalam reproduksi pembedaan kultural. Hal ini terlihat, misalnya, dalam konsepsi Nasikun (1984) tentang sistem sosial Indonesia, konsepsi Geertz tentang politik aliran (1973), dan konsepsi Wertheim tentang stratifikasi berdasarkan ras (1956).

Luput dari cara pandang seperti itu adalah pertanyaan "siapa sebenarnya yang layak menjadi representasi satu satuan budaya?" Mengapa perempuan dari sebuah desa miskin tidak dapat dianggap sebagai representasi praktik Islam? Apakah anak-anak tidak dapat dianggap sebagai representasi sosial? Dalam artian inilah kritik terhadap aliran pemikiran fungsionalisme – satu kontributor utama paradigma modernisasi – menjadi penting untuk diperhatikan.

Kesibukan melakukan pabrikasi bahwa kepluralistisan merupakan ciri khas Indonesia menghadirkan persoalan lanjutan dan berjangka panjang. Intelektual akademik dan universitas lebih memusatkan perhatian pada peningkatan martabat bangsa. Kajian tentang martabat bangsa menggunakan gagasan Edward (1978) menjadi *political knowledge*. Hanya kemasannya saja yang mengesankannya sebagai *humanistic knowledge*.

Kesibukan bekerja dalam konsepsi Indonesia sebagai masyarakat pluralistik telah mem-

buat intelektual akademik dan universitas secara keseluruhan sibuk mengurusinya. Mendeskripsikan ciri-ciri kepluralistisan Indonesia berdasarkan metodologi ilmiah, mengumpulkan data tentang dampak kepluralistisan Indonesia, dan mengelola proyek ilmiah untuk membina kerukunan sosial. Meningkatkan martabat bangsa pun menjadi tujuan penting yang diperjuangkan dalam dan melalui produksi pengetahuan ilmiah. Istilah yang mereka gunakan adalah "integrasi nasional". Konsepsi yang ada di balik istilah tersebut berpusar pada perlunya elemen-elemen masyarakat Indonesia saling berhubungan dan berkontribusi positif bagi kemajuan Indonesia. Hal ini, seperti yang dikatakan dalam teks fungsionalisme dan modernisasi, merupakan kewajaran sosiologis: baik integrasi sistem maupun kontribusi sub sistem merupakan prasyarat kehidupan bersama yang bersifat universal.

Dalam artian inilah intelektual akademik dan universitas dapat menerima kehadiran rezim birokratis otoriterisme di era Orde Baru. Integrasi nasional tidak dapat berjalan dengan sendirinya, memerlukan adanya pemerintah yang menempatkan diri sebagai fasilitator, pemantau, *supervisor* dan sekaligus pemberi hukuman dan ancaman hukuman bagi mereka yang mencoba merusak integrasi nasional, baik ancaman yang dipandang negara sebagai hasil kerja komunisme maupun radikalisme Islam. Dengan demikian, implementasi paradigma modernisasi telah mendorong intelektual akademik untuk menerima kehadiran *strong state* (Shin, 1991; Philpott, 2000)

Aspek yang diberikan oleh intelektual akademik terhadap persoalan martabat bangsa berbeda-beda. Fokus yang diberikan oleh intelektual akademik Universitas Gadjah Mada, misalnya, berbeda dengan fokus intelektual Universitas Indonesia. Fokus intelektual universitas lain, berlainan pula. Namun, perbedaan tersebut lebih merupakan perbedaan variasi. Bahkan, bila unit pengamatan diperluas, terlihat bahwa martabat bangsa juga menjadi perhatian universitas di negara-negara maju pada waktu itu. Hal ini, menurut Delanty (2001), merupakan

hal yang umum pada waktu itu. Universitas pada waktu itu memandang diri dan dipandang sebagai penjaga budaya nasional. Hal ini juga sesuai dengan atmosfer era Perang Dingin, ketika negara-bangsa dianggap sebagai *survival unit* kehidupan umat manusia.

Pembeda antara intelektual akademik Indonesia dari kolega mereka yang berasal dari negara maju adalah kecenderungannya untuk ikut terlibat dalam memproduksi citra martabat bangsa yang lebih berharga daripada martabat manusia. *As a matter of fact*, kecuali mereka yang menekuni ilmu hukum dan sastra, para intelektual akademik cenderung tidak akrab dengan persoalan martabat manusia. Mereka, sesuai dengan proposisi paradigma modernisasi, cenderung memusatkan perhatian pada individu. Psikologi tertarik pada individu dan perkembangannya sebagai warga masyarakat, ilmu sosial lainnya tertarik pada individu sebagai pewaris masyarakat. Di sini, individu diasumsikan sebagai warga masyarakat. Para intelektual akademik negara-negara maju sendiri memusatkan perhatian untuk terus mengembangkan demokrasi (Delanty, 2001; Gouldner, 1972).

Pembahasan tentang martabat bangsa (atau, integrasi nasional) sendiri terkesan tidak tuntas. Tidak ada karya ilmiah yang sedemikian berharganya sehingga dijadikan referensi utama. Referensi utama intelektual akademik tetap saja buah pikiran para pengembang paradigma modernisasi.

Salah satu bukti ketidaktuntasan ini adalah tentang penyebab gesekan komunal. Intelektual akademik percaya bahwa perbedaan nilai dan norma antarunit budaya bukanlah penyebab utama konflik komunal, melainkan perebutan sumber daya ekonomi dan politik. Penyulut konflik, tidak mereka teliti secara mendalam. Mereka cenderung mengambil alih istilah yang digunakan oleh negara, yaitu, "oknum", "provokator", atau "aktor intelektual". Sepengetahuan penulis, tidak ada karya intelektual akademik yang membahas apa benar konflik komunal merupakan hasil provokasi pihak ketiga atau merupakan hasil kerja aktor intelektual.

Bukti kedua, diskriminasi (baik oleh negara atau bukan) terhadap perempuan. Perlu waktu lebih dari satu dekade untuk masuknya *gender inequality* ke dalam kurikulum universitas. Hanya intelektual akademik yang berjenis kelamin perempuan yang tertarik untuk mempersoalkan diskriminasi *gender*. Itu pun tidak seluruhnya.

Bukti ketiga, kerusuhan anti-Cina tidak dilihat sebagai ganjalan terhadap pengembangan martabat bangsa. Baru setelah masa Orde Baru hal tersebut dilihat sebagai persoalan yang berhubungan dengan martabat manusia. Itu pun belum selesai sampai sekarang, satu dekade setelah kerusuhan terbesar terjadi. Intelektual akademik dan universitas pada umumnya cenderung memandang kerusuhan anti Cina sebagai bukti tajamnya kesenjangan sosial ekonomi di antara orang Cina dan, apa yang disebut pada waktu itu sebagai "pribumi".

ORDE BARU SEBAGAI TITIK AWAL PEMBANGUNAN

Sejak awal, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Suharto menyebut diri "pemerintah Orde Baru". Era sejak dimulainya pemerintahan tersebut dinamakan "era Orde Baru". Menurut *official text* yang dikonstruksi pada pertengahan tahun 1960-an itu, pemerintahan pendahulu Suharto dianggap sebagai bagian dari masa lalu Indonesia – "era Orde Lama". Masa lalu itu sendiri dikesankan sebagai masa kegelapan bagi rakyat – penderitaan dan kekacauan ekonomi politik – sebagai salah urus negara. Kesalahan terutama ditimpakan pada PKI. Kemudian, potensi kesalahan ditimpakan juga pada orang Cina dan Muslim – politik identitas (Heryanto, 2006; Lindsey dan Pausacher eds., 2005; Aprianto, 2003; Coppel, 1983).

Self image yang diciptakan tentang pemerintahan Orde Baru sendiri bertolak belakang. Pemerintah Orde Baru dicitrakan sebagai pemerintah yang, antara lain, berkomitmen pada Pembangunan Nasional, antikomunisme dan ditopang oleh ahli-ahli ekonomi dan militer. Ringkasnya, citra yang ditampilkan tentang

pemerintah Orde Baru adalah pemerintah yang akan membawa Indonesia menuju masyarakat yang makmur, adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Era Orde Baru dicitrakan sebagai suatu era di mana titik awal pembangunan dimulai.

Citra tentang pemerintah Orde Baru tersebut, melalui berbagai arena, ditanamkan pada masyarakat luas. Upaya mempertanyakan citra tersebut secara terang-terangan akan menimbulkan masalah hukum bagi yang melakukannya. Bukan hukuman bagi pelaku, tetapi rasa takut yang ditimbulkan pada berbagai kalanganlah yang penting. Rasa takut menyebabkan tidak berusaha mempertanyakan citra tersebut secara terang-terangan.

Persoalannya, apakah rasa takut yang menyebabkan intelektual akademik pada umumnya untuk tidak mempertanyakan *claim* tersebut? Mungkin saja. Ada juga kemungkinan lain, yakni, status pekerjaan mereka. Intelektual akademik umumnya berstatus Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti negara memiliki kontrol langsung atas mereka. Selain itu, negara juga merupakan konsumen terbesar penelitian sosial. Dana hibah dan pinjaman asing masuk ke Indonesia melalui negara (Samuel, 2003). Namun, penulis juga menemukan bahwa kecenderungan mereka untuk memandang era Orde Baru sebagai titik awal pembangunan terjadi karena hal ini cocok dengan *stock of knowledge* mereka sebagai pengguna paradigma modernisasi. Untuk menjelaskannya, harus diperhatikan proposisi-proposisi pokok paradigma modernisasi itu sendiri.

Sebagai sebuah perangkat konseptual, paradigma modernisasi dibentuk dan dikembangkan untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat: bagaimana ilmu sosial dapat terlibat dalam upaya memajukan masyarakat? (Suwarsono dan So, 1991). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, fokus mereka ditempatkan pada pemecahan masalah sosial. Hal ini dilakukan dengan memandangnya sebagai gejala sosial dan melihat kaitan gejala termaksud dengan gejala-gejala lain dalam konteks masyarakat. Penggunaan metodologi

deskriptif-analitis ini, secara operasional berujung pada seperangkat tindakan identifikasi, diagnostik, dan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mengatasinya (Samuel, 2003a).

Dengan corak produksi pengetahuan ilmiah seperti itu, penjelasan kausalitas dan fungsional pun menjadi patokan metodologis yang berharga. Penggunaannya juga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan komunitas ilmiah pada umumnya dan komunitas paradigma modernisasi sendiri pada khususnya. Robert K. Merton (1968) menegaskan hal ini dalam perangkat patokan teoretis dan metodologis yang disusunnya. Menurutnya, perangkat patokan tersebut dihipunkannya dari pandangan berbagai sosiolog fungsionalisme tentang prinsip analisis ilmiah. Lebih jauh, corak produksi pengetahuan tersebut dapat dianggap sebagai turunan visi Bapak Sosiologi tentang peranan sosiologi dalam menjelaskan, meramalkan dan mengontrol perkembangan sosial (Seidman, 1998).

Orientasi pada pemecahan masalah menyebabkan pengguna pendekatan modernisasi perlu menentukan T0 dan T1 analisis. T1 analisis merupakan kondisi masyarakat pada satu waktu tertentu di masa depan – setelah rekomendasi kebijakan dijalankan. T0 analisis adalah kondisi masyarakat saat penelitian mulai dilaksanakan, *existing conditions*. Diasumsikan bahwa masyarakat pada T0 analisis merupakan hasil perubahan dari masa-masa sebelumnya, yang menarik untuk dianalisis secara mendalam hanya untuk kepentingan akademis memberikan pemahaman tambahan tentang masyarakat pada T0 analisis. Hal ini dapat diperiksa, misalnya, pada hasil penelitian Clifford Geertz (1963). Tokoh pengembang paradigma modernisasi ini mengakui bahwa perkembangan masyarakat Jawa yang bersifat involutif di akhir tahun 1950an terjadi juga sebagai akibat kebijakan kolonial Belanda yang eksploitatif-dominatif terhadap masyarakat Jawa. Namun, pengakuan tersebut dituangkannya hanya dalam catatan kaki.

TEKNOKRATISASI PEMBANGUNAN

Para pengembang paradigma modernisasi percaya bahwa lingkungan penting untuk masyarakat. Tenaga kerja, dana, dan berbagai sumber daya lain yang menjadi prasyarat kelangsungan hidupnya, tersedia di lingkungan. Persoalannya, bagaimana sumber daya tersebut dapat diserap dan diolah untuk kemajuan masyarakat.

Sepanjang menyangkut era Orde Baru, pabrikan pandangan tersebut telah menghasilkan citra tentang intelektual akademik, yakni (1) mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk “membaca” kebutuhan masyarakat, kebutuhan lingkungan, dan menyesuaikan keduanya satu sama lain, dan (2) ilmu pengetahuan yang mereka jadikan *vocation* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal inilah yang telah membawa mereka ke posisi strategis dalam mengelola pemerintahan.

Secara khusus, *image* yang membuahkan kestrategisan intelektual akademik tersebut terlihat dari berbagai hal. Pertama, mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan melalui penyusunan perencanaan pembangunan atas dasar prinsip-prinsip ilmiah. Perencanaan seperti itu pun lebih dapat dipertanggungjawabkan – dibandingkan dengan perencanaan yang disusun oleh ideolog atau politisi secara lebih rinci, jelas, dan didasarkan pada data yang diperoleh berdasarkan penggunaan metodologi ilmiah. Kedua, Selo Soemardjan dan koleganya memiliki akses ke negara-negara maju di Amerika Utara dan Eropa Barat. Negara-negara tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia akan sumber daya – dana, teknologi, dan pengalaman melaksanakan modernisasi. Di sini, negara-negara komunis tidak lagi dianggap sebagai bagian dari lingkungan Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan Indonesia. Bahkan, kemungkinan kembalinya komunisme ke Indonesia harus dicegah. Ketiga, intelektual akademik memiliki kemampuan untuk mentransmisi pengetahuan dan keahlian mereka kepada orang-orang Indonesia – melalui universitas. Keempat, meminjam istilah yang diguna-

kan Gardono, *mindset* intelektual akademik digerakan oleh kekuatan logika daripada oleh logika kekuatan. Mereka merupakan representasi kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri, pada waktu itu, dianggap sebagai "penyelamat" Indonesia.

Keterlibatan intelektual akademik dalam menyusun dan menjalankan agenda-agenda Pembangunan Nasional, teknokratisasi pembangunan, berlangsung hampir sepanjang usia Orde Baru. Ilmu pengetahuan dimanfaatkan untuk menyediakan *means of orientation* dan *means of communication* (Elias, 1971, 1971a). Universitas menjadi organ penting dalam memproduksi bahan baku untuk penyusunan kebijakan pembangunan dan menjadi bagian dari mekanisme pembangunan nasional. Baik untuk memberikan justifikasi maupun menjalankan agenda negara (Kleden dalam Nordholt dan Visser eds., 1995).

Namun, pembangunan sendiri bukan hanya membutuhkan intelektual akademik. Keahlian mereka, pada waktu itu, dianggap penting untuk perbaikan kesejahteraan Indonesia. Pembangunan sendiri menghendaki juga penggunaan pendekatan keamanan, baik untuk mendukung implementasi perencanaan intelektual akademik maupun untuk menjalankan berbagai agenda negara untuk *regime maintenance*. Sebaliknya, lembaga legislatif dan yudikatif lebih diposisikan sebagai kelengkapan formal demokrasi prosedural sepanjang sejarah Orde Baru. Presiden mengintervensi bekerjanya lembaga legislatif. Bahkan, kehidupan partai politik mengalami proses reorganisasi. Jumlah partai politik dikurangi hingga menjadi tiga – Golkar sebagai kekuatan terbesar didampingi oleh dua partai kecil. Hal serupa terjadi pada serikat buruh, media massa, dan elemen-elemen masyarakat sipil pada umumnya.

Teknokratisasi pembangunan Indonesia sendiri belum pernah terjadi sebelumnya. Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, pengelolaan dan penentuan arah Indonesia dilakukan oleh politisi dan kekuatan militer – di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Fokus pem-

angunan pun lebih pada upaya untuk menjaga keutuhan Indonesia dari ancaman imperialisme Barat. Jasa intelektual akademik digunakan hanya secara minimal – untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat teknis. Feith (1962) menyebut rezim Demokrasi Terpimpin sebagai *populist authoritarian regime*.

Feith (1980) menyebut kerja sama segitiga Presiden, teknokrat, dan militer dalam penentuan arah masyarakat sebagai *Repressive developmentalist regime*. Dan hal ini terjadi juga di beberapa masyarakat lain di Asia mulai era 1960an, seperti di Korea Selatan dan Filipina. Pembangunan ekonomi dijadikan pusat pembangunan nasional. Memang, pada waktu itu fokus dunia internasional lebih ditempatkan pada upaya mengikis keterbelakangan di negara-negara sedang berkembang. Kemasan yang digunakan oleh PBB adalah *New World Economic Order*, bukan *Millenium Development Goals*.

Ringkasnya, pabrikasi paradigma modernisasi telah mendorong muncul dan berkembangnya teknokratisasi pembangunan. Paradigma tersebut telah memberikan keyakinan pada intelektual akademik dan universitas untuk mengambil peran besar dalam menentukan arah pembangunan Indonesia. Pertanyaan lanjutannya adalah apa saja yang terabaikan selama Perang Dingin tersebut? Mengapa dapat terabaikan?

Berbagai temuan penelitian telah dihasilkan tentang dampak teknokrasi pembangunan pada masa Orde Baru. Kemiskinan menurun secara gradual sehingga di pertengahan dekade 1990-an mencapai 17%. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa kesenjangan sosial ekonomi juga mulai menyempit. Ekonomi kapitalis juga makin menggejala. Modal domestik bergandeng tangan dengan modal asing dalam praktik Demokrasi Pancasila. Indonesia dikategorikan sebagai "seekor macan kecil" Asia. Hal-hal tersebut merupakan hasil penggunaan paradigma modernisasi untuk "membaca" dan membentuk Indonesia.

Di pihak lain, terjadi hal-hal yang menarik. Pertama, paradigma modernisasi ternyata tidak menghasilkan berkembangnya demokrasi. Dalam perencanaan pembangunan, warna *top-down* justru semakin kokoh. Prinsip *stake holder process* lebih merupakan harapan. Kedua, berbagai praktik kehidupan yang dianggap tidak sesuai dengan pembangunan mengalami rekayasa, khususnya praktik-praktik sosial budaya yang dianggap sebagai penghambat pembangunan. Ilmu pengetahuan digunakan untuk merekayasa pembangunan, ilmu pengetahuan pula yang digunakan untuk mengubah berbagai praktik sosial budaya yang tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan. Ketiga, intelektual akademik Indonesia memang sadar akan perbedaan di antara negara-negara sedang berkembang di Asia dengan negara-negara maju di Amerika Utara dan Eropa Barat. Namun, perbedaan lebih cenderung dilihat sebagai perbedaan tahap perkembangan masyarakat.

Intelektual akademik menyadari bahwa pengetahuan ilmiah tentang modernitas tumbuh dan berkembang berdasarkan kenyataan sosial Amerika Utara dan Eropa Barat. Namun, pengaruh teknokratisasi pembangunan mengarahkan mereka pada upaya untuk menyesuaikan penggunaannya pada konteks masyarakat Indonesia. Koentjaraningrat (1974), misalnya, mengingatkan kita bahwa Modernisasi tidak identik dengan Westernisasi. Dia juga mengingatkan kita bahwa gotong royong tidak harus dilihat sebagai hal yang menghambat pembangunan (1974, 1977). Namun, *background assumptions* (Gouldner, 1972) yang melandasi proposisi-proposisi paradigma modernisasi tidak tersentuh. Hal ini juga tampak pada buah pikiran intelektual akademik lainnya.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Pertama, sebagian besar intelektual akademik memang merupakan lulusan universitas di Amerika Utara dan Eropa Barat. Namun, studi yang mereka lakukan umumnya tentang Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari tesis dan disertasi yang mereka susun. Pengalaman mereka tentang masyarakat Amerika Utara dan Eropa Barat, dengan

demikian, lebih merupakan pengalaman hidup sehari-hari. Itupun amat terbatas. Bukan sebagai pengalaman ilmiah. Kedua, pengembang paradigma modernisasi, secara turun temurun, mereproduksi *claim* bahwa gagasan dasar paradigma modernisasi bersifat universal. Alasannya, paradigma modernisasi disusun berdasarkan metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah sendiri bersifat universal. Ketiga, paradigma modernisasi setua ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Tidak ada pesaing yang dapat mengimbanginya. Bahkan pemikiran Marxis, yang biasa dianggap berada di luar paradigma modernisasi, sebenarnya hanya merupakan satu varian pemikiran modernitas (Hoogvelt, 1981; Suwarsono dan So, 1991). Pandangan dasar tentang perkembangan masyarakat yang evolusionistis dan bersandar pada oposisi biner tetap menjadi asumsi dasar Marxis.

KEMELUT KEMISKINAN

Salah satu keberhasilan pemerintah Orde Baru adalah mendorong muncul dan berkembangnya konsensus bahwa kemiskinan merupakan masalah terbesar bangsa yang harus ditanggulangi melalui Pembangunan (ekonomi) Nasional. *Official text* ini terus menerus direproduksi nyaris dalam berbagai kesempatan oleh Presiden dan pejabat dari berbagai lapisan birokrasi. Media massa pun turut serta menyuarakannya. Berbagai program dilaksanakan di berbagai departemen. Program-program tersebut didasarkan pada perencanaan yang disusun oleh Bappenas secara sistematis.

Berbagai kalangan – termasuk pemuka agama – dengan mudah mencerna *official text* tersebut dan memberikan legitimasi tentang kemiskinan sebagai musuh bangsa. Mereka tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk mengetahui bahwa kemiskinan memang merupakan masalah, yang menimbulkan berbagai dampak negatif.

Dan upaya untuk menanggulunginya, tepat dan mulia. Sebaliknya, mempertanyakan upaya pengikisan kemiskinan sama saja dengan me-

nyanggah kebenaran ajaran moral tentang egalitarianisme dan pembebasan *wong cilik*.

Dalam berbagai kesempatan terbatas, konstruksi tentang kemiskinan sebagai masalah terbesar bangsa dilengkapi dengan jawaban "mengapa kemiskinan begitu mendera orang Indonesia?" Dalam buku-buku pelajaran sejarah dan dalam materi P4, hal ini ditimpakan pada pemerintah sebelumnya. Pemerintah Orde Lama dipandang sedemikian ambisiusnya membangun proyek-proyek mercusuar dan pembangunan politik sehingga telah menyebabkan penderitaan rakyat, seperti tingkat inflasi yang tinggi, harga bahan pokok yang meroket, dan fondasi ekonomi Indonesia yang porak poranda.

Lebih jauh, *official text* pemerintah Orde Baru menjanjikan kemajuan demokrasi akan terjadi setelah pembangunan ekonomi membuah hasil. Pengembangan demokrasi dalam kondisi masih tingginya proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan hanya akan bersifat *counter-productive*. Dengan demikian yang perlu dilakukan adalah mempercepat laju pembangunan ekonomi – di bawah pimpinan pemerintah Orde Baru. Soemitro Djojohadikusumo pernah mengatakan bahwa percepatan tersebut untuk mengejar keteringgalan Indonesia selama beberapa ratus tahun dari bangsa-bangsa Barat.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah dalam *official text* tersebut, orang miskin dituntut untuk lebih terpuruk dulu sebelum dapat keluar dari kemiskinan. Wujudnya, antara lain, penggusuran pemukiman kumuh, upah buruh yang ditekan ke batas minimum dan kontrol atas serikat buruh, dan konversi lahan di pinggir kota menjadi lokasi pabrik atau prasarana pembangunan. Logika yang digunakan adalah (1) tanpa pengorbanan sulit untuk membayangkan penciptaan kue pembangunan dan (2) tanpa kue pembangunan, hanya ada "bagi-bagi kemiskinan", bukan perbaikan ekonomi. Penanaman logika itu sendiri dilakukan secara sistematis melalui berbagai arena dan dengan berbagai cara, baik secara persuasif maupun represif. Berdasarkan penelitiannya, Ariel

Heryanto (2006) menemukan signifikannya praktik terorisme negara – melalui penciptaan stigmatisasi dan berpegangan pada UU Anti-subversif. Peneliti-peneliti lain tentang Indonesia pada masa Orde Baru juga menemukan bagaimana dominannya pemerintah dalam diskursus tentang pembangunan nasional.

Apa yang dilakukan universitas? Universitas, yang didirikan dalam skala besar di mana-mana baru pada masa Orde Baru, juga diorientasikan pada pembangunan (ekonomi). Arahnya adalah membantu pemerintah, sekurangnya memproduksi pengetahuan ilmiah yang tidak bertentangan dengan upaya pengentasan kemiskinan, entah pengetahuan ilmiah tentang demokrasi yang cocok dengan rezim dan/atau mendorong pertumbuhan "kue pembangunan".

Data tentang *curriculum vitae* intelektual akademik senior pada waktu itu memperlihatkan keterlibatan mereka secara intensif dalam berbagai dimensi disipliner pengentasan kemiskinan. Melalui pengajaran, perhatian mahasiswa ditarik ke arah kemiskinan. Melalui penelitian, akumulasi pengetahuan tentang penyebab dan akibat kemiskinan dibangun. Begitu juga dengan berbagai *unintended consequences* program-program pengentasan kemiskinan. Melalui pengabdian pada masyarakat, Kuliah Kerja Nyata, dan berbagai aktivitas dibangun tentang pengentasan kemiskinan. Pada skala yang jauh lebih kecil, perhatian tentang kemiskinan juga dituangkan dalam jurnal ilmiah, termasuk di sini penyusunan berbagai perangkat kriteria untuk mengukur tingkat kemiskinan. Di tahun 1990-an kegiatan ini bahkan meluas menjadi pemetaan desa miskin dan klasifikasi ekonomi keluarga berdasarkan kesejahteraan. Sementara itu, ukuran konsumsi beras, *income per capita*, dan berbagai perangkat pengukuran lain tetap digunakan.

Diskursus tentang kemiskinan sendiri pada dasarnya terbagi menjadi dua: kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Yang terakhir, ditokohi – antara lain – oleh Parsudi Suparlan. Berbagai penelitian telah dilakukannya tentang budaya kemiskinan – di berbagai

daerah. Berbagai tulisan pada jurnal ilmiah juga dihasilkannya. Bahkan, buku ajar tentang kemiskinan di perkotaan juga disusunnya. Kemiskinan struktural baru mencuat ke permukaan sekitar awal dekade 1980-an – melalui publikasi paper seminar HIIPIS di Malang.

Perbedaan pandangan tentang kemiskinan tersebut, walau begitu, tidak pernah menjadi tajam. Yang terjadi adalah memperkaya kajian tentang kemiskinan. Maksudnya adalah untuk meneguhkan anggapan bahwa walau merupakan kemelut besar, upaya mengikis kemiskinan tidak pernah boleh berhenti – di bawah kepemimpinan pemerintah Orde Baru.

Keterlibatan universitas dalam pengentasan kemiskinan sendiri dimungkinkan karena adanya alokasi dana oleh negara – hasil pinjaman luar negeri dan hibah. Tiap departemen pemerintah mengalokasikan dana untuk pengentasan kemiskinan. Intelektual akademik – terutama di lingkungan PTN – memanfaatkannya untuk melakukan seminar dan penelitian. Hasilnya kemudian diserahkan pada departemen pemberi proyek.

Banyak manfaat yang telah dipetik melalui patronase negara tersebut. Akumulasi pengetahuan ilmiah tentang pembangunan ekonomi dan tentang pengentasan kemiskinan terjadi. Padahal, gagasan *research university* belum sepopuler seperti sekarang ini. Universitas dan intelektual akademik juga mendapatkan dana segar untuk melaksanakan berbagai kegiatan mandiri. Lebih jauh, temuan-temuan penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan menjadi referensi bagi peneliti asing yang hendak melakukan penelitian tentang Indonesia. Namun, referensi tersebut kurang mendunia karena sedikit hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional.

Masalahnya kemudian adalah apakah hubungan negara dengan universitas hanya akan berlangsung atas dasar keuntungan material? Walaupun ada keuntungan material yang sama-sama diperoleh melalui *policy recommendations* buatan universitas, tidak beralasan untuk mengatakan bahwa hubungan di antara keduanya semata-mata bersifat prag-

matis. Anggapan seperti itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan untuk “mengapa universitas yang dipilih sebagai partner utama pengentasan kemiskinan, mengapa pemerintah yang dipilih oleh intelektual akademik sebagai partner utama produksi pengetahuan, dan mengapa kedua belah pihak yang sama-sama sadar akan perbedaan sifat dasar masing-masing mau bekerjasama satu sama lain?”

Kesukarelaan intelektual akademik dalam pengentasan kemiskinan sama sekali bukan semata-mata merupakan tanggapan atas kebijakan Orde Baru. Bahkan, Selo Soemardjan dan beberapa kolega intelektual akademiknya yang menyuarakan pentingnya pengentasan kemiskinan, termasuk mereka yang berada di MIPI – cikal bakal Leknas-LIPI. Mereka menaruh harapan pada Jenderal Suharto untuk mewujudkan hal ini (Yusra, 1995; Sunarto, 1989; Koentjaraningrat, 1976). Mereka juga yang mengawali gagasan tersebut sejak pada tahap perencanaan – melalui Bappenas.

Dalam implementasi perencanaan keterlibatan sukarela tersebut juga terlihat. Intelektual akademik terlibat dalam penyusunan berbagai program pemberdayaan masyarakat desa, pelembagaan program Keluarga Berencana, revitalisasi lembaga gotong royong, dan berbagai program pengentasan kemiskinan lainnya. Mereka juga mengidentifikasi besarnya peranan tokoh agama untuk mendorong (atau sebaliknya) program-program tersebut. Lebih jauh, melalui intelektual akademik pula pinjaman, hibah dan berbagai dukungan internasional untuk pengentasan kemiskinan difasilitasi (Feith, 1980).

Kesimpulannya, universitas terlibat tanpa paksaan dalam mendorong muncul dan berkembangnya konsensus tentang pengikisan kemiskinan dan mencantumkan sebagai agenda pembangunan nasional. Hal ini merupakan prestasi besar universitas pada masa Orde Baru. Selo Soemardjan (1994, 1991), misalnya, mengatakan bahwa ilmu tidak akan bermakna bila tidak diabdikan untuk perumusan kebijakan. Dia bahkan memiliki rumusan sendiri (Yusra, 1995).

Walau patronase negara atas universitas tidak 100% mulus, secara umum dapat dikatakan adanya keserasian yang relatif tinggi di antara negara dan universitas. Hal yang menarik untuk ditelusuri adalah *tacit knowledge* seperti apa yang terjalin di antara keduanya? Artinya, konsensus dasar terjalin di antara keduanya, tetapi keberadaannya tidak disadari.

Bila gerak-gerik universitas dalam persoalan pengentasan kemiskinan kita perhatikan, *background assumptions* (Gouldner, 1972) yang mewarnainya bersumber dari asumsi dasar paradigma modernisasi tentang manusia, masyarakat, kebudayaan, dan pembangunan.

Seorang Marksis akan dengan mudah menerima pandangan bahwa kondisi ekonomi merupakan hal yang amat mendasar dalam pengorganisasian kehidupan. Namun, seseorang tidak harus mengemban gagasan Marksis untuk percaya akan predominasi kondisi ekonomi. Intelektual akademik Indonesia menyandarkan dirinya pada pandangan dasar paradigma modernisasi. Secara khusus, ada 3 gagasan pokok paradigma modernisasi yang menjadi landasan *tacit knowledge* mereka.

Pertama, masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem dengan komponen-komponennya yang saling berkaitan. Anggapan dasar pendekatan modernisasi ini, digunakan untuk meneropong Indonesia, menghasilkan pandangan bahwa Indonesia merupakan sebuah sistem. Komponen-komponennya terdiri atas berbagai subsistem, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal yang harus dilakukan adalah mendorong keserasian sosial, sekurang-kurangnya tidak mendorong kerusakan. Kerusakan pada satu subsistem dipercaya akan berdampak pada subsistem-subsistem lain dan, pada akhirnya, pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Anggapan ini sedemikian dihayati oleh intelektual akademik karena pada umumnya merupakan lulusan pascasarjana di Amerika Utara dan Eropa Barat. Namun, hal ini dengan mudah diintegrasikan ke dalam *stock of knowledge* mereka. "Masyarakat, dalam falsafah Timur, merupakan sebuah keluarga besar",

"toleran merupakan ciri orang Indonesia", dan "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh".

Dalam kaitan ini, otoritas yang dipegang oleh pemerintah merupakan dasar bagi intelektual akademik untuk menganggap pemerintah sebagai representasi masyarakat Indonesia, bukan representasi tunggal, tetapi yang terutama.

Kedua, kondisi ekonomi merupakan prasyarat utama tercapainya harmoni sosial. Clifford Geertz dan para pengembang paradigma modernisasi lain (khususnya) yang berasal dari Amerika Utara mempercayai hal ini. Menurut mereka, kekacauan yang mewarnai kebanyakan masyarakat Asia di seputar tahun 1960-an disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk. Kekacauan tersebut berbahaya. Negara-negara baru apabila tidak dapat memperbaiki kondisi ekonomi, akan jatuh ke tangan kekuatan komunis. Kerawanan terutama terjadi di Asia Tenggara sebab kepentingan Amerika Serikat tidak hanya terbatas di benua Amerika, tetapi kerawanan di Asia cepat atau lambat akan mengancam kepentingan Amerika Serikat.

Tidak ditemukan bukti bahwa intelektual akademik Indonesia menyanggah pemahaman tentang arti penting kondisi ekonomi bagi kelangsungan hidup Indonesia. Perbedaan tampaknya lebih terpusat pada soal strategi pengentasan kemiskinan dan ukuran-ukuran kemiskinan. Mubyarto dan intelektual akademik Universitas Gadjah Mada cenderung menganggap strategis pengembangan ekonomi desa untuk pengentasan kemiskinan, sedangkan intelektual akademik Universitas Indonesia lebih memusatkan perhatian pada kemiskinan di perkotaan.

Hasil penelitian di sini merupakan asumsi dasar dan temuan-temuan pengembang paradigma modernisasi telah memberikan dasar teoretis dan metodologis bagi intelektual akademik Indonesia untuk "membaca" kemiskinan. Pengentasan kemiskinan bukan persoalan moral, tetapi juga persoalan ilmiah. Intelektual akademik memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi mengatasi masalah kemiskinan

dan membangun ekonomi Indonesia secara ilmiah.

Bagaimana dengan corak pembangunan itu sendiri? Para pengembang paradigma modernisasi percaya bahwa pembangunan secara bertahap lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada pembangunan secara revolusioner. Lebih *manageable*, melalui pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, masyarakat berkesempatan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Goncangan yang terlalu mendasar dan mendadak pada masyarakat masyarakat yang sudah terpuruk akan bersifat *counter productive*, dan merugikan proses pembangunan itu sendiri, baik pembangunan infrastruktur, institusi sosial, maupun pembangunan sikap mental orang Indonesia secara bertahap. Dengan demikian, diisyaratkan, diperlukan perencanaan menyeluruh secara ilmiah yang disusun berdasarkan data.

Apa yang kurang terangkat dalam dukungan sukarela universitas pada agenda negara dalam pembangunan ekonomi? Pertama, korupsi. Walau korupsi disadari telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi, yang menghambat pembangunan, penghapusan korupsi cenderung lebih merupakan harapan daripada upaya sistematis. Kedua, perhatian intelektual akademik sedemikian tersitanya oleh pembangunan ekonomi sehingga konsepsi masalah sosiologis cenderung terpaku pada persoalan-persoalan di seputar pembangunan ekonomi. Intelektual akademik cenderung memandang kerusuhan anti-Cina yang terjadi beberapa kali selama masa Orde Baru merupakan cerminan kesenjangan sosial ekonomi. Hal ini meneguhkan anggapan mereka bahwa pengentasan kemiskinan tidak terelakkan. Di pihak lain, dapat saja beranggapan bahwa universitas, tanpa sengaja, telah memberikan alasan bagi orang miskin untuk melakukan pelanggaran Hak-hak Azasi Manusia.

SIMPULAN

Adalah tidak tepat untuk beranggapan bahwa gerak-gerik universitas dan intelektual

akademik semata-mata bersifat pragmatis. Sudah ditunjukkan adanya berbagai suasana-suasana khusus yang meliputi perkembangan universitas, perkembangan *regime* dan kehidupan sosial pada umumnya. Suasana yang berlandaskan implementasi pendekatan modernisasi menjadi skenario besar. Skenario-skenario kecil yang dijalankan oleh universitas, negara (dan bahkan korporasi) merupakan operasionalisasi skenario besar tersebut. Hal ini terlihat dari tiga hal yang dibahas.

Di satu pihak skenario besar tersebut menjadi "*road map*" bagi universitas dan negara untuk menjalankan peranan masing-masing. Titik keberangkatan, perjalanan, dan tujuan yang kelak akan dicapai, baik tujuan masing-masing, maupun tujuan bersama. Di sini, skenario besar tersebut telah berhasil memancing kesukarelaan mereka dalam menjalankan peranan masing-masing dan bekerja dengan pihak lain.

Sepanjang berkaitan dengan Indonesia, universitas – dengan demikian – dapat dikatakan lebih merupakan representasi format kapitalisme maju untuk membentuk Indonesia. Hal ini terjadi tanpa disadari. Dalam memainkan peranannya, secara sukarela intelektual akademik cenderung tidak menganggap dominasi negara terhadap mereka sebagai persoalan besar. Kebebasan Akademik, misalnya, bukan persoalan. Mereka percaya adanya otonomi yang bersifat relatif berdasarkan perbedaan ilmu dari ideologi. Keotonimian itu sendiri kemudian berusaha diperbesar melalui pengembangan konsep Paradigma Baru Perguruan Tinggi Indonesia 1995.

Apakah keamatan hubungan di antara universitas dengan pendekatan modernisasi merupakan keharusan sejarah? Suatu pertanyaan lanjutan ini menarik untuk dijawab, tetapi akan dijawab pada kesempatan yang lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprianto, Tri Chandra. 2003. 'Kekerasan dan Politik Ingatan: Paramiliter Banser dalam Tragedi 1965-1966 di Jawa Timur'. In *Politik dan Postkolonialitas*

- di Indonesia ed. By Budi Susanto, S.J. Yogyakarta: Kanisius, pp. 19-92.
- Coppel, Charles. 1983. *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Delanty, Gerard. 2001. *Challenging Knowledge: The University in the Knowledge Society*. Buckingham: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.
- Feith, Herbert. 1980. 'Repressive-Developmentalist Regimes in Asia: Old Strengths, New Vulnerabilities.' *Prisma: the Indonesian Indicator* 19 (December), pp. 39-55.
- Geertz, Clifford. 1973. 'The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States' in *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, pp. 255-311.
- . 1963. *Agricultural Involution: the Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Gouldner, Alvin. 1972. *The Coming Crisis of Western Sociology*. London: Heinemann.
- Heryanto, Ariel. 2006. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. London: Routledge.
- Hoogvelt, Ankie M.M. 1997. *Globalisation and the Post Colonial World: the New Political Economy of Development*. Basingstoke: Macmillan.
- Kayam, Umar. 1989. 'Transformasi Budaya Kita.' Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di Muka Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah Mada pada Tanggal 19 Mei 1989 di Yogyakarta.
- Kleden, Ignas. 1994. *The Involvement of the Involvement Thesis: Clifford Geertz's Studies on Indonesia Revisited*. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Bielefeld.
- Koentjaraningrat. 1977. "Sistem Gotong Royong dan Jiwa Gotong Royong." *Berita Antropologi* no. 30, Pebruami, pp. 4-16.
- Koentjaraningrat (.). 1976. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- . (.). 1974. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Nasikun. 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Nordholt, Nico Schulte and Leontine Visser eds. 1995. *Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism*. Amsterdam: VU University Press.
- Philpott, Simon. 2000. 'Knowing Indonesia: the Making of an Orientalist Discourse' in *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity*. London: MacMillan Press. pp. 1-45,
- Said, Edward W. 1994. *Representations of the Intellectual*. New York: Vintage Books.
- . 1978. *Orientalism: Western Conceptions of the Orient*. London: Penguin Books.
- Samuel, Hanneman. 2003. 'Indonesian Social Sciences: Looking Back, Creating the Future' in *Regional Cooperation and Identity Building in East Asia in the Age of Post Cold War Globalisation*. eds. by Park Sa-myung and Supachai Yavaprabhas. Seoul: Korean Association of Southeast Asian Studies, pp. 255-74.
- . 2003a. "Pembangunan dan Modernitas: Dimana Kita Berada?." *Antropologi Indonesia* XXVII, 70: 106-9.
- Shin, Yoon Hwan. 1991. *Demystifying the Capitalist State: Political patronage, Bureaucratic Interests, and Capitalists-information in Soeharto's Indonesia*. A Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Yale, Michigan.
- Soemardjan, Selo .1994. *Kegunaan Ilmu-ilmu Sosial Di Dalam Masyarakat*. A paper. Jakarta: YIIS.
- . 1991. *The Changing Role of Intellectuals in Inonesian National Development*. A paper. Jakarta: YIIS.
- Sunarto, Kamanto. 1989. 'Sosiologi.' dalam *Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia Sampai Dekade '80-an*. (ed.) by Malo. Jakarta: PAU-IS-UI dan Rajawali Press, pp.199-273.
- Susanto, Budi, S.J. 2000. 'Pesona (dan Paradoks) Modernisasi' in *Imaginasi Penguasa dan Identitas Postkolonial: Siasat Politik (kethoprak) Massa Rakyat*. Yogyakarta: Kanisius, pp.50-116
- Suwarsono and So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Wertheim, W. 1956. *The Changing Status System. in Indonesian Society in Transition*. The Hague: W. van Hoeve, pp. 115-45.
- Yusra, Abrar. 1995. *Biography: Komat Kamit Selo Soemardjan*. Jakarta: Gramedia.